

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Sofyan, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta.

Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eddy OS. Hiarieej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Ikwan Fahroji, 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.

Yenti Garnasih, 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Edisi 1, Cetakan 4, Rajawali Pers, Depok.

Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung.

Johani Ibrahim, 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet.III, Bayumedia Publishing, Malang.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018. *Pedoman penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Perpustakaan Nasional RI.

Lilik Mulyadi, 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Mandar Maju, Bandung.

-----, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Di Persidangan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Yusuf, 2014. *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

KUHAP 2025

C. JURNAL

Ariesta Wiryawan, 2016. *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak
Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*. Hal 6.

Budi Saiful Haris, 2016. *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian
Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal
Integritas, Vol 2.

Danu Surya Putra & Rehnalemken Ginting, 2018. *Analisis Dasar
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak
Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*. Jurnal Hukum Pidana dan
Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret.

Diky Anandya, Lalola Easter Kaban, 2023. *Laporan Hasil Pemantauan
Tren Vonis 2022 Menurunnya Performa Kerja Mahkamah Agung*,
ICW.

Erna Dewi, 2013. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Pranata, Fakultas
Hukum Universitas Bandar Lampung.

Muhammad Rezza Kurniawan & Pujiyono Pujiyono, 2018. *Modus
Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh
PNS*. Law Reform, Universitas Diponegoro, Vol 14.

Romli Atmasasmita, 2006. *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta.

Toetik Rahayuningsih, 2018. “*Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*”
Yuridika 28, no. 3.

D. Website

Febriana Sulistya Pratiwi, *Kupas Data : Kerugian Negara akibat Korupsi Tembus Rp 230 Triliun dalam Sedekade?*, Dataindonesia.id, Desember 13, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/kupas-data-kerugian-negara-akibat-korupsi-tembus-rp230-triliun-dalam-sedekade>.

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus
Hukum

F. Putusan

Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK//2024/PT.DKI.

Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024.

